

KRISIS KEPEMIMPINAN: URGENSI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIKA DALAM KEPEMIMPINAN

Ariel Julians¹, Rafi Nazhmi Nugraha², Muhamad Shandy Winata³
arieljulians@upi.edu¹, rafinazhminugraha@upi.edu², mshandywinata@upi.edu³
Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Dalam ranah kepemimpinan, krisis seringkali mengungkapkan pentingnya kerangka etika yang mendasar. Makalah ini mengeksplorasi urgensi Pancasila sebagai landasan etika dalam kepemimpinan di tengah krisis kepemimpinan kontemporer. Pancasila, sebagai fondasi filosofis Indonesia, mencerminkan prinsip-prinsip yang sangat penting bagi kepemimpinan yang efektif dan etis, termasuk keadilan, demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan sosial. Dengan meneliti tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan secara global dan di dalam Indonesia, makalah ini berargumen untuk penyegaran kembali prinsip-prinsip Pancasila untuk membimbing para pemimpin dalam menavigasi dilema etika yang kompleks dan membangun tata kelola yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui analisis perbandingan dan studi kasus, makalah ini menekankan relevansi Pancasila dalam mengatasi krisis kepemimpinan kontemporer dan menyoroti keharusan bagi para pemimpin untuk mengintegrasikan prinsip-prinsipnya dalam proses pengambilan keputusan mereka..

Kata Kunci: Pancasila, Kepemimpinan, Krisis.

ABSTRACT

In the realm of leadership, crises often reveal the fundamental importance of ethical frameworks. This paper explores the urgency of Pancasila as an ethical foundation in leadership amidst contemporary leadership crises. Pancasila, as Indonesia's philosophical foundation, embodies principles crucial for effective and ethical leadership, including justice, democracy, unity, and social welfare. By examining the challenges faced in leadership globally and within Indonesia, this paper argues for the reinvigoration of Pancasila's principles to guide leaders in navigating complex ethical dilemmas and fostering sustainable and inclusive governance. Through a comparative analysis and case studies, this paper underscores the relevance of Pancasila in addressing contemporary leadership crises and emphasizes the imperative for leaders to integrate its principles into their decision-making processes.

Keyword: Pancasila, Leadership, Crisis.

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan kekayaan budaya dan etnisitasnya yang luar biasa, dihadapkan pada tantangan unik dalam hal kepemimpinan. Krisis kepemimpinan telah menjadi fenomena yang kerap menghiasi ruang publik dan diskusi akademis (Umar, 2013). Dampaknya pun tak hanya terbatas pada stabilitas politik, tetapi juga merembes ke ranah kesejahteraan masyarakat dan perkembangan bangsa (Rosandi, 2018).

Di tengah situasi ini, Pancasila, ideologi negara, hadir sebagai potensi jawaban. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, dapat menjadi landasan etika yang kokoh bagi para pemimpin bangsa (Amri, 2018).

Sebagai sebuah sistem etika, Pancasila menuntun pemimpin dalam berperilaku dan bertindak. Nilai Ketuhanan mendorong pemimpin untuk berpegang teguh pada moralitas dan spiritualitas, memandu mereka dalam mengambil keputusan yang adil dan berpihak pada rakyat (Priwardani, Monica, & Yaasiin, 2023). Nilai Kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial, mendorong pemimpin untuk melayani rakyat dengan penuh empati dan tanpa diskriminasi.

Persatuan dan Kerakyatan mewajibkan pemimpin untuk menjunjung tinggi persatuan bangsa dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Keadilan sosial menjadi kompas moral pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia (Nuraeni & Dewi, 2022).

Lebih dari sekadar nilai-nilai ideal, Pancasila juga menawarkan panduan praktis dalam penerapannya. Dengan memahami teori kepemimpinan dan strategi pengembangan skill kepemimpinan (Gaol, 2020), para pemimpin dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan mereka (Putri, 2021).

Implementasi Pancasila dalam kepemimpinan bukan hanya tanggung jawab para pemimpin, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Masyarakat perlu aktif dalam mengawasi dan mengingatkan pemimpin agar selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, tercipta sinergi yang kuat antara pemimpin dan rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

METODE

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur. Proses analisis literatur melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan subjek penelitian. Sumber-sumber ini mencakup publikasi ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional, literatur akademik, dan laporan penelitian yang kredibel. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi Prinsip Pancasila dalam Konteks Kepemimpinan

Pancasila, sebagai landasan filosofis negara Indonesia, terdiri dari lima sila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kepemimpinan modern.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa:

Prinsip ini menekankan keberadaan Tuhan sebagai sumber keadilan dan kebenaran. Dalam kepemimpinan, pemimpin yang memahami hal ini akan memiliki kebijaksanaan spiritual yang dalam, membimbing mereka dalam menghadapi tantangan moral dan etika.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghormati martabat manusia, nilai keadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemimpin yang menjalankan prinsip ini akan memprioritaskan kesejahteraan dan hak asasi manusia dalam kebijakan mereka.

c. Persatuan Indonesia:

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Pemimpin yang menginternalisasi prinsip ini akan berusaha membangun jembatan antar kelompok dan menjaga harmoni sosial.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:

Prinsip ini menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, serta kepemimpinan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Pemimpin yang menerapkan prinsip ini akan melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan menghormati nilai-nilai demokrasi.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

Prinsip ini menekankan pembangunan merata dan inklusif, serta peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pemimpin yang menghormati prinsip ini akan berusaha mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya.

Dengan memahami relevansi prinsip-prinsip Pancasila dalam kepemimpinan, para pemimpin dapat lebih memahami tanggung jawab moral dan etika mereka dalam memimpin suatu negara atau organisasi. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik kepemimpinan dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

2. Pengaruh Pancasila dalam Pengambilan Keputusan Kepemimpinan

Pancasila, sebagai ideologi bangsa Indonesia, memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan kepemimpinan. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan moral dan etika bagi para pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntun pemimpin untuk berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang beriman akan senantiasa mempertimbangkan dampak keputusannya bagi rakyat dan bangsa, serta bertindak dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa (Amri, 2018; Hekmatullah et al., 2021).

Nilai Kemanusiaan mendorong pemimpin untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Keputusan pemimpin haruslah berpihak pada rakyat, memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua golongan masyarakat (Priwardani et al., 2023; Putri, 2021).

Nilai Persatuan mewajibkan pemimpin untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keputusan pemimpin haruslah mempertimbangkan kepentingan bersama, menghindari tindakan yang dapat memecah belah bangsa, dan selalu mengutamakan kepentingan nasional (Hernandi, 2023).

Nilai Kerakyatan menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Pemimpin haruslah selalu mendengarkan suara rakyat, melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, dan senantiasa bertanggung jawab kepada rakyat (Gaol, 2020; Nuraeni & Dewi, 2022).

Nilai Keadilan Sosial menjadi kompas moral pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan pemimpin haruslah berorientasi pada penciptaan keadilan sosial, pemerataan akses terhadap sumber daya, dan pengentasan kemiskinan (Rosandi, 2018; Umar, 2013).

Penerapan Pancasila dalam pengambilan keputusan kepemimpinan tidak hanya berdampak pada kualitas keputusan, tetapi juga membangun kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Pemimpin yang berlandaskan Pancasila akan dipandang sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan bermoral, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan rakyat dalam mewujudkan tujuan bersama.

3. Penyegaran Kembali Prinsip Pancasila dalam Kepemimpinan Kontemporer

Penyegaran kembali prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks kepemimpinan kontemporer menjadi suatu keharusan mengingat dinamika dan perubahan zaman yang terus berkembang. Hal ini melibatkan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin, seperti pembaharuan dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan menjadi kunci untuk memastikan prinsip-prinsip Pancasila tetap relevan dan terintegrasi dalam praktik kepemimpinan. Program-program ini harus mampu memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila serta mengajarkan cara efektif menerapkannya dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

Mendorong keterlibatan aktif masyarakat juga merupakan aspek penting dalam proses kepemimpinan juga menjadi fokus penting. Para pemimpin perlu membangun hubungan yang erat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan mengintegrasikan pandangan mereka dalam pembuatan keputusan.

Adaptasi terhadap perubahan sosial dan lingkungan menjadi suatu keharusan dalam kepemimpinan kontemporer. Pemimpin harus mampu menginterpretasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam konteks global yang terus berubah dan menemukan cara baru untuk menerapkannya dalam penyelesaian masalah-masalah saat ini. Kemudian, peningkatan kesadaran akan implikasi etis dari setiap keputusan yang diambil merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Para pemimpin perlu mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap nilai-nilai moral dan keadilan yang mendasari Pancasila.

Adapun di perlukan nya kolaborasi dan keterbukaan sebagai peran penting menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan penyegaran kembali prinsip Pancasila dalam kepemimpinan kontemporer. Pemimpin perlu bersedia untuk belajar dari berbagai pengalaman dan pandangan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Dengan memperhatikan aspek aspek penting tersebut, pemimpin dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila tetap menjadi pedoman yang kuat dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan mereka. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan modern yang dinamis.

4. Implementasi Prinsip Pancasila dalam Krisis Kepemimpinan Kontemporer

Dalam menghadapi krisis kepemimpinan kontemporer, prinsip-prinsip Pancasila menjadi landasan penting bagi para pemimpin dalam mengambil keputusan yang efektif dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini memberikan arahan moral yang kuat untuk mengatasi tantangan dan dilema etika yang kompleks, sambil membimbing para pemimpin dalam menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek implementasi prinsip Pancasila dalam situasi krisis kepemimpinan:

Pertama, prinsip gotong royong menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam mengatasi tantangan bersama. Para pemimpin yang memegang prinsip ini akan menggerakkan sumber daya dan energi bersama-sama untuk menangani masalah yang dihadapi, tanpa memandang perbedaan atau kepentingan individu. Mereka akan membangun kerjasama lintas sektor dan masyarakat untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat menjadi fokus utama dalam menangani krisis. Para pemimpin akan memastikan bahwa penanganan krisis dilakukan secara adil dan merata, tanpa membedakan atau meninggalkan golongan tertentu. Perlindungan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, terutama yang rentan dan terdampak secara ekonomi dan sosial, akan menjadi prioritas.

Ketiga, prinsip persatuan dan harmoni mendorong pemimpin untuk memelihara kesatuan di tengah keberagaman sosial dan budaya. Dalam menghadapi krisis, pemimpin akan berupaya membangun jembatan antar kelompok dan menghindari polarisasi retorika. Mereka akan menekankan pentingnya solidaritas dan saling mendukung dalam mengatasi tantangan bersama, serta mempromosikan dialog dan rekonsiliasi untuk pemulihan.

Keempat, prinsip demokrasi mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Para pemimpin akan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanganan krisis. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan didengar dan dipertimbangkan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama dan teruji dalam perdebatan demokratis.

Kelima, dalam menghadapi krisis, pemimpin akan mencari keseimbangan antara kepemimpinan yang tegas dan kebijaksanaan yang adil. Meskipun diperlukan langkah-langkah tegas dalam waktu singkat, prinsip keadilan sosial menuntut bahwa tindakan yang diambil tidak melanggar hak asasi atau memperburuk ketidaksetaraan yang ada.

Melalui implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam krisis kepemimpinan kontemporer, pemimpin dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dan bertanggung jawab untuk menangani tantangan yang dihadapi masyarakat. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan legitimasi dalam kepemimpinan mereka, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip Pancasila bukan hanya sekadar hukum konstitusional, melainkan juga pedoman moral yang kuat bagi para pemimpin dalam menghadapi tantangan dan dilema etika dalam kepemimpinan modern.

Pancasila, dengan nilai-nilainya seperti keadilan, gotong royong, persatuan, dan demokrasi, menyediakan kerangka kerja yang solid bagi para pemimpin untuk membuat keputusan yang etis dan berkelanjutan. Nilai-nilai ini membimbing para pemimpin dalam menempatkan kesejahteraan bersama sebagai prioritas utama dan memelihara persatuan dalam keberagaman, sehingga mengurangi konflik dan meningkatkan solidaritas sosial di tengah krisis. Lebih dari sekadar menjadi konsep filosofis, Pancasila harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam kepemimpinan sehari-hari. Para pemimpin perlu memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Pancasila melalui pendidikan, pelatihan, dan praktik kepemimpinan yang inklusif. Langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan kepemimpinan yang mendorong partisipasi publik, dialog terbuka, dan tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Dengan memperjuangkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kepemimpinan, diharapkan dapat terbentuk pemimpin-pemimpin yang mampu menghadapi tantangan zaman dan membawa masyarakat menuju kesejahteraan bersama. Ini tidak hanya tentang menciptakan pemimpin yang efektif secara praktis, melainkan juga tentang membentuk karakter pemimpin yang memiliki integritas dan keberanian, serta bertanggung jawab, yang dapat menginspirasi dan memimpin dengan baik di semua tingkatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai Sistem Etika. *Jurnal Voice of Midwifery*, 8(1), 760-768. <https://www.journal.umpalopo.ac.id/index.php/VoM/article/view/43>
- Gaol, N. T. L. (2020). Teori Kepemimpinan: Kajian dari Genetika sampai Skill. *BENEFIT: Jurnal Manajemen & Bisnis*, 5(2), 158-173. <https://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/11810>
- Hekmatullah, S., Aulia, A., Oktavian, A. R., & Steyaningrum, R. P. (2021). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 169-182. <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas/article/view/350>
- Hernandi, A. (2023). MODEL KEPEMIMPINAN PANCASILA DALAM MASYARAKAT PLURAL: SEBUAH KAJIAN PUSTAKA. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 3(1), 58-64. <https://jurnalpembumianpancasila.id/index.php/jpp/article/view/43>
- Nuraeni, I., & Dewi, D. A. (2022). Peranan Pancasila Sebagai Landasan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9986-9991. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4003>
- Priwardani, A. N., Monica, A. A. D., & Yaasiin, M. N. F. (2023). Pancasila sebagai Sistem Etika. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 226-232. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79642>
- Putri, F. S. (2021). Implementasi Pancasila sebagai Sistem Etika. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 176-184. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/1327>
- Rosandi, M. (2018). Sikap Bijak Generasi Penerus Menghadapi Krisis Kepemimpinan Dalam Pemilu. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 2(1), 3-4. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8176>
- Umar, B. W. (2013). Krisis Kepemimpinan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 7-21. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/109>